

# Implementasi Aplikasi Sipraja dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Maria Anis Suhartatik (232020100186),

Dr. Isnaini Rodiyah. M.Si

Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari, 2024

# Pendahuluan

Otonomi desa memungkinkan desa untuk mengelola pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Namun, saat ini masih banyak desa yang mengalami kesulitan dalam mengelola pemerintahan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan desa yang baik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Tata kelola pemerintahan desa yang baik ini mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan atau kewajaran dalam menjalankan aturan dan prosedur yang berlaku (UU, “Nomor 23 Tahun 2014”).

Kabupaten Sidoarjo telah memperkenalkan sebuah sistem informasi desa bernama SIPRAJA (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meresmikan aplikasi SIPRAJA pada bulan Februari 2020, yang telah mencakup 18 kecamatan serta 353 desa atau kelurahan, termasuk di antaranya adalah Desa Siwalanpanji di Kecamatan Buduran. SIPRAJA bertujuan untuk mengembangkan layanan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dasar yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Sidoarjo.

# Gap Permasalahan

Hambatan implementasi Aplikasi Sistem Informasi Rakyat Sidoaro (Sipraja) di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo adalah: yang *pertama* pada penggunaan awal aplikasi SIPRAJA masyarakat masih kurang mengetahui dan memahami tentang penggunaan aplikasi, dikarenakan Pemerintah Desa Siwalanpanji kurang dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. *Kedua*, Sumber Daya perangkat desa Siwalanpanji masih belum menguasai Aplikasi Sipraja selain Operatornya, *Ketiga*, Aktor utama Kepala Desa Siwalanpanji yang seharusnya sebagai penanggung jawab, tidak memahami aplikasi tersebut. *Keempat* : Kendala pada server di Kabupaten Sidoarjo sering terjadi error.

# Data Empiris

Daftar Pemohon SIPRAJA di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

| No | Tahun | Jumlah      |
|----|-------|-------------|
| 1  | 2020  | 38 pemohon  |
| 2  | 2021  | 143 pemohon |
| 3  | 2022  | 699 pemohon |
| 4  | 2023  | 721 pemohon |

Sumber : Aplikasi Sipraja Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran 2023

# Penelitian Terdahulu

- yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Erwin Apriliyanto (2023) tentang SIPRAJA Application-Based Village Governance Tata Kelola Pemerintahan Desa Berbasis Aplikasi SIPRAJA menunjukkan beberapa faktor penting[4]. Faktor pertama adalah akuntabilitas program SIPRAJA di Kantor Desa Kenongo, yang telah efektif dalam menetapkan aturan-aturan dan bertanggung jawab atas apa yang telah pemerintah tetapkan mengenai aplikasi SIPRAJA. Akan tetapi masih terdapat beberapa perangkat desa yang masih kesulitan menggunakan teknologi atau sistem. Tidak hanya perangkat desa saja yang masih kesulitan dalam menggunakan teknologi tersebut tetapi masyarakat desa setempat yang sudah lansia dan masyarakat yang masih kurang ilmu atau wawasan terhadap pengetahuan tentang teknologi juga kesulitan untuk mengoperasikan sistem tersebut, dan masih ada kendala-kendala lain seperti keluhan masyarakat yang sudah mendaftar dan masih belum dikonfirmasi untuk login seperti contoh pembuatan KK, dikarenakan pihak perangkat desa masih belum menerima atau mengkonfirmasi dan perangkat desa masih menyelesaikan tugas-tugas yang lain yang harus diselesaikan. Selain itu, program SIPRAJA tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan harapan pemerintah Desa Kenongo Kecamatan Tulangan.

# Penelitian Terdahulu

- yang kedua dilakukan oleh Mala Nuraif Tri Ningtias (2023) dengan judul Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SiPraja) di Desa Boro Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa komunikasi sudah dua arah tetapi masih banyak warga yang belum memahami aplikasi tersebut. Sumber daya manusia dan sarana-prasarana sudah memadai. Disposisi program telah baik, tetapi struktur birokrasi masih memiliki kendala. Faktor penghambat adalah loading lama saat login dan server yang belum optimal
- ketiga, adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Ilmi Fahri Danurrohman (2023) yang berjudul Efektifitas Program Sipraja (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo) Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Sedati Studi menunjukkan bahwa di Kecamatan Sedati, implementasi penggunaan media sosial dalam menangani keluhan masyarakat masih memiliki kendala. Respon pertanyaan lambat, kurangnya kejelasan penyelesaian pertanyaan, dan tata bahasa respon yang kurang baik masih sering terjadi pada layanan pengaduan masyarakat melalui media sosial. Selain itu, masyarakat umumnya mengharapkan kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan yang cepat, pelayanan yang baik tanpa keluhan atau sindiran, serta tuntutan atas pelayanan yang jujur dan sama untuk semua orang.

# Metode

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, seperti yang dijelaskan oleh Nurwega (2015). Metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena mengenai perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan pemerintahan desa yang mengadopsi aplikasi SIPRAJA dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

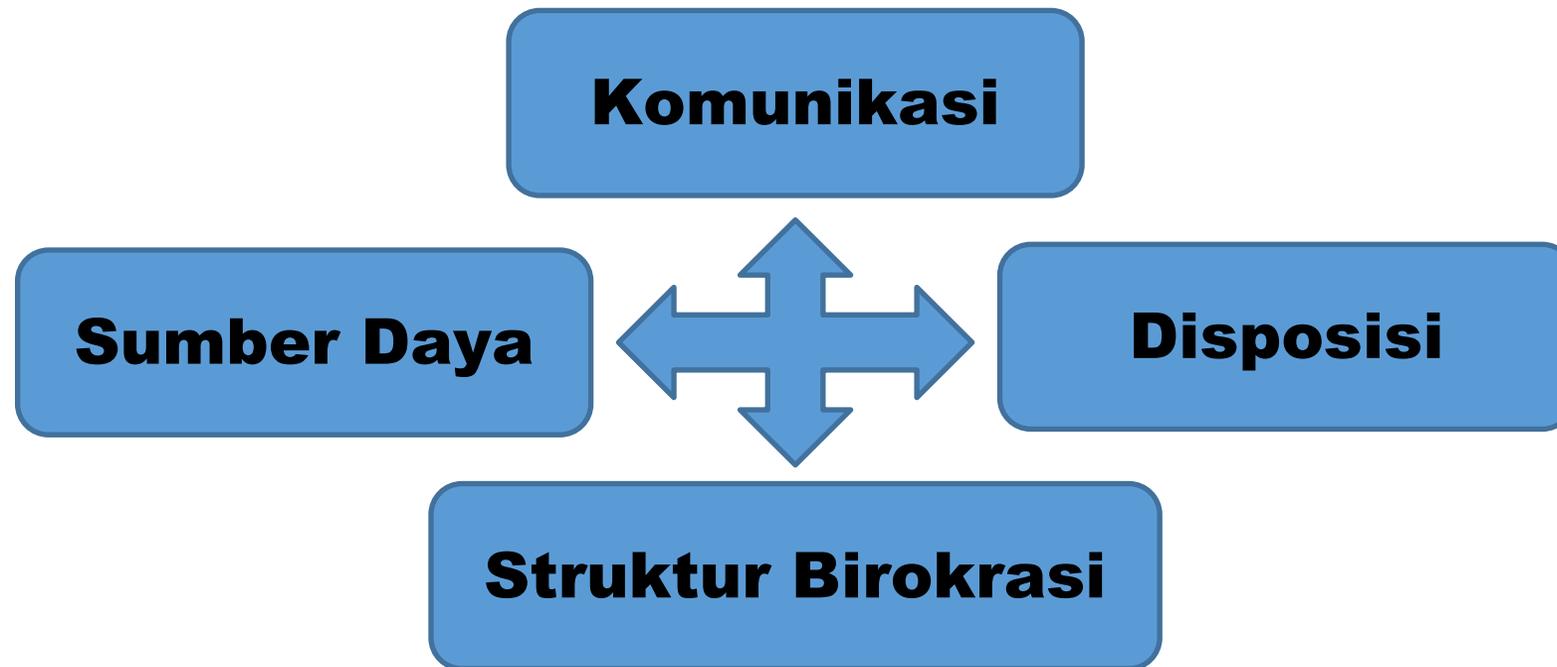
Teknik penentuan informan yang digunakan adalah purposive sampling, di mana partisipan dipilih dengan pertimbangan mereka yang dianggap memahami permasalahan terkait penelitian dan dapat memberikan informasi yang berkualitas (Tanriono, 2015). Untuk mengidentifikasi dan memahami temuan tertentu dari data yang telah dikumpulkan, analisis ini meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

# Hasil dan Pembahasan

Aplikasi SiPraja adalah sebuah inovasi layanan terbaru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Pendirian sistem ini diwujudkan dengan tujuan membantu masyarakat saat hendak mengurus surat, sehingga tak perlu datang ke kantor desa atau kelurahan. Penggunaan aplikasi SiPraja tak hanya mempermudah masyarakat untuk mengurus surat saja, tetapi juga memberikan layanan pelacakan dokumen. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui lokasi surat yang sedang diurus melalui telepon seluler. Jika ada surat yang telah ditandatangani secara elektronik oleh camat atau lurah, kelurahan akan menerima notifikasi berupa pesan elektronik serta email dari SiPraja. Masyarakat yang ingin mencetak surat yang telah diurus tidak perlu melakukan cetak di luar, karena dapat mencetaknya sendiri di rumah. Dengan dukungan aplikasi SiPraja, masyarakat Sidoarjo tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengurus surat, sehingga dapat membantu memaksimalkan efisiensi dan produktivitas.

# Hasil dan Pembahasan

Implementasi sistem pelayanan rakyat Sidoarjo (SiPraja) di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo dianalisis dengan menggunakan model Edward III yang terdiri dari empat indikator



# Hasil dan Pembahasan

## Komunikasi

Pada dimensi komunikasi Pemerintah Desa Siwalanpanji sudah berhasil menjalankan transmisi dengan baik, Dengan adanya 2 Perangkat desa yang ditugaskan sebagai admin kepengurusan menggunakan Sipraja dan satu khusus untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dari segi kejelasan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga sudah memberikan sosialisasi kepada petugas Sipraja. Konsistensi juga terlihat baik dengan adanya alur layanan yang jelas. Namun dari segi komunikasi antara Kepala desa dan operator kurang baik karena ketidaktahuan kepala desa terkait aplikasi sipraja.

## Sumber Daya

Pada dimensi Sumber daya sudah terpenuhi dengan adanya petugas yang mumpuni dalam pengoperasian Aplikasi Sipraja dan sarana prasarana juga tersedia dengan baik dan bisa berjalan. Namun honor operator belum ada sehingga berpotensi menurunkan motivasi dari Operator Sipraja.

# Hasil dan Pembahasan

## Disposisi

Untuk dimensi Disposisi terbagi menjadi 2 yaitu sikap dan respon dari operator Sipraja, Pemerintah Desa Siwalanpanji mampu menjalankan sikap dan respon terhadap masyarakat dalam pelayanan sipraja tergolong sangat baik dan mempunyai komitmen dalam pelaksanaan layanan berbasis sipraja.

## Struktur Birokrasi

Parameter struktur birokrasi Pemerintah Desa Siwalanpanji sudah sesuai dengan regulasi yang ada, namun dari segi pengetahuan kepala desa belum sepenuhnya mengerti dalam segi approval layanan. Sehingga berdampak pada lambatnya layanan yang berbasis online.

# Hasil dan Pembahasan

## **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Sistem Pelaksanaan Rakyat Sidoarjo (SiPraja) di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo**

Faktor penghambat yang sering terjadi adalah ketidaktahuan Kepala Desa dalam melakukan persetujuan terkait dengan seluruh pelayanan berbasis Sipraja.

# Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Aplikasi Sipraja dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan menggunakan Sipraja di Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, diketahui bahwa dari aspek komunikasi telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya perangkat desa yang bertugas untuk mengarahkan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan dengan menggunakan aplikasi Sipraja. Dari aspek sumber daya sudah terlihat sangat baik, pemenuhan sumber daya sudah tercukupi seperti pengadaan sarana dan prasarana untuk implementasi Sipraja sudah terpenuhi, kemampuan perangkat desa sebagai operator sipraja terlihat mampu dalam mengoperasikan Aplikasi Sipraja. Hanya alokasi anggaran yang masih memerlukan inovasi sebagai motivasi operator desa. Terkait dengan diposisi mampu berjalan dengan baik karena komitmen dari pihak berwenang seperti kepala desa dan perangkat desa sebagai operator dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dari aspek struktur birokrasi koordinasi dan komunikasi dari pihak penyelenggara hingga pemerintah desa berjalan cukup baik dilihat dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Sehingga Implementasi Aplikasi Sipraja di Desa Siwalanpanji berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan walaupun masih ada beberapa yang perlu disesuaikan.

# Referensi

- [1] K. Ali and A. Saputra, “TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA PEMATANG JOHAR,” *Warta Dharmawangsa*, vol. 14, no. 4, 2020, doi: 10.46576/wdw.v14i4.891.
- [2] Pemerintah Indonesia, *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*,. Indonesia, 2016.
- [3] Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018*, . Indonesia, 2018.
- [4] U. Arifah, “Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik,” *Prosiding Senas POLHI ke-1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang 17*, 2018.
- [5] E. Apreliyanto and I. Fitria Agustina, “Tata Kelola Pemerintahan Desa Berbasis Aplikasi SIPRAJA,” 2018.
- [6] M. Nuraif, T. Ningtias, L. Mursyidah, and K. Kunci, “Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SiPraja) di Desa Boro Kabupaten Sidoarjo,” 2023.
- [7] I. F. Danurrohman and A. Susiantoro, “EFEKTIFITAS PROGRAM SIPRAJA (SISTEM PELAYANAN RAKYAT SIDOARJO) DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN SEDATI,” *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, vol. 3, no. 5, 2023.
- [8] D. Nurwega, “PEMBINAAN KARAKTER ANTIKORUPSI SISWA PADA LINGKUNGAN BOARDING SCHOOL (Studi Kasus di Pesantren Tahfidz Sekolah Menengah Pertama (SMP) Daarul Qur’an Bandung),” 2015.
- [9] Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.,” Bandung: Alfabeta., 2016.
- [10] L. J. Moleong, “Metodologi penelitian kualitatif / penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A.,” PT Remaja Rosdakarya, 2018.

# Referensi

- [11] H. G. Ridder, M. B. Miles, A. Michael Huberman, and J. Saldaña, “Qualitative data analysis. A methods sourcebook,” *Zeitschrift fur Personalforschung*, vol. 28, no. 4, 2014.
- [12] D. Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. 2016.
- [13] Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- [14] D. A. Sindiana and I. Rodiyah, “Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Pada Pemerintah Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon,” 2023.
- [15] R. Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Politik Kebijakan, Etika Kebijakan, Kimia Kebijakan*. . Jakarta: Elex Media Komputindo., 2020.
- [16] D. Setyawan, *Pengantar Kebijakan Publik*, vol. Intelegensia Media. Jakarta: Intelegensia Media. , 2017.
- [17] Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi*. Jakarta : : PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2003.
- [18] N. Isnaini Agustin and I. Usrotin Choiriyah, “Implementation of the Sidoarjo People’s Service System Program (SIPRAJA) as an Embodiment of Smart Governance [Implementasi Program Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) Sebagai Perwujudan Smart Governance],” *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 2022.
- [19] Bupati Sidoarjo, *Praturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023*. Sidoarjo, 2022.
- [20] F. Mega Maulidia, “PENGARUH STRUKTUR BIROKRASI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR) (Studi di Puskesmas Kabupaten Gunungkidul),” 2018.

